

PERUBAHAN SIGNIFIKAN
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2026

A. KOMPONEN SAKIP

1. Perencanaan Kinerja

- Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia dan disusun secara berjenjang mulai dari Renstra, Perjanjian Kinerja, hingga SKP pegawai.
- Penyelarasan hubungan antara sasaran, indikator, target, dan outcome pada seluruh level jabatan terus dilakukan melalui penerapan cascading kinerja.
- Matriks cascading kinerja dari level OPD sampai pegawai telah disusun guna memastikan keterkaitan tujuan dan sasaran organisasi secara selaras.
- Pemahaman pegawai terhadap keterkaitan kinerja individu dengan kinerja perangkat daerah terus ditingkatkan melalui penyelarasan dokumen perencanaan dan evaluasi berkala.
- Perencanaan kinerja telah diarahkan untuk mendukung pencapaian hasil yang terukur, efektif, dan berorientasi outcome.

2. Pengukuran Kinerja

- Pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berkala sebagai dasar dalam mengetahui capaian indikator dan target kinerja perangkat daerah.
- Sosialisasi dan literasi pengukuran kinerja kepada unit kerja dan pegawai telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap indikator, target, dan capaian kinerja.
- Penyusunan panduan teknis/SOP pengukuran kinerja terus dikembangkan agar proses pengukuran lebih mudah dipahami dan diterapkan secara seragam.

- Hasil pengukuran kinerja mulai dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.
- Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah.

3. Pelaporan Kinerja

- Laporan kinerja telah disusun secara berkala dan memuat informasi capaian kinerja perangkat daerah.
- Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian pimpinan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan.
- Penyajian informasi kinerja terus disempurnakan agar lebih informatif, mudah dipahami, dan menggambarkan keberhasilan maupun kendala pelaksanaan kinerja.
- Hasil pelaporan kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi dan aktivitas untuk mendukung pencapaian target kinerja berikutnya.
- Evaluasi kinerja secara periodik telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan melalui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi APIP.
- Hasil evaluasi internal telah diintegrasikan ke dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen SAKIP perangkat daerah.
- Pemanfaatan hasil evaluasi internal terus dioptimalkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

- Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi evaluasi dilakukan secara berkala guna memastikan perbaikan berkelanjutan.
- Implementasi SAKIP menunjukkan peningkatan melalui penguatan koordinasi, evaluasi, dan penyempurnaan dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja.

B. UPAYA STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN

1. Melakukan penyelarasan dokumen perencanaan kinerja mulai dari Renstra, Perjanjian Kinerja, hingga SKP pegawai melalui penerapan cascading kinerja.
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi terkait pengukuran serta evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Menyusun matriks cascading kinerja dan panduan teknis pengukuran kinerja guna meningkatkan pemahaman pegawai terhadap akuntabilitas kinerja.
4. Melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi APIP dalam penyempurnaan implementasi SAKIP.
5. Mengoptimalkan penyusunan laporan kinerja yang lebih informatif dan berorientasi pada hasil (outcome).

C. UPAYA LAINNYA

1. Penguatan koordinasi internal dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.
2. Peningkatan kapasitas pegawai terkait implementasi SAKIP dan pengukuran kinerja melalui sosialisasi dan pembinaan.
3. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan program dan kegiatan perangkat daerah.

4. Optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja secara berkala untuk mendukung peningkatan akuntabilitas perangkat daerah.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



MUSNI WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690608 19909 1 001